



An Analysis of Behavioral Accounting and Islamic Ethics toward the Effectiveness of Regional Government Information System (SIPD) Implementation

Auliya'i Kholqillahil Karimah¹, Kholilah Nailul Ulya², Mashudi³

auliyaqilla04@gmail.com¹, kholilanailululya@gmail.com², mashudi88@lecturer.uinkhas.ac.id³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of behavioral accounting and Islamic ethics on the effectiveness of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD). The study is motivated by the importance of digital transformation in regional financial management, which is influenced not only by the quality of information technology but also by the behavior of government officials and the application of ethical values within public organizations. This research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving officials directly engaged in the implementation of SIPD, including system operators, treasurers, and regional financial reporting officers. The findings indicate that the effectiveness of SIPD implementation is influenced by human resource readiness, positive attitudes toward technology, adaptability, and organizational support. Furthermore, the application of Islamic ethical values such as *amanah* (trustworthiness), honesty, responsibility, and justice plays a significant role in enhancing the transparency and accountability of regional financial management. Government officials with high ethical integrity tend to demonstrate greater discipline and optimize the use of SIPD more effectively than those with lower ethical awareness. The study concludes that the successful implementation of SIPD requires not only reliable technological infrastructure but also positive user behavior and the integration of Islamic ethical principles in regional financial management.

Keywords: Behavioral Accounting; Islamic Ethics; Information System Effectiveness; Regional Government Information System (SIPD); Regional Financial Management.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan daerah di Indonesia terus dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini digunakan untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Penerapan SIPD diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mempermudah proses administrasi keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya implementasi SIPD masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kemampuan aparatur, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan sistem kerja berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku individu yang menggunakan sistem tersebut.

Dalam perspektif akuntansi keperilakuan, penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh sikap, motivasi, persepsi, dan kemampuan individu dalam menerima perubahan teknologi. Pendekatan ini menjelaskan bahwa perilaku pengguna menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sistem informasi organisasi. Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Setiawan (2021) menjelaskan bahwa dukungan organisasi dan lingkungan sosial dapat memengaruhi niat individu dalam menggunakan sistem informasi secara optimal. Dalam konteks SIPD, aparatur pemerintah yang memiliki sikap positif terhadap teknologi dan memahami manfaat sistem cenderung lebih mudah menerima serta menggunakan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor perilaku memiliki pengaruh terhadap efektivitas implementasi sistem informasi pemerintahan. Triyanti dan Widhiyani (2025) menemukan bahwa persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan pengguna berpengaruh terhadap penerimaan SIPD di pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek psikologis dan perilaku pengguna menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi sistem informasi pemerintahan. Selain itu, Ningtyas (2021) menjelaskan bahwa sistem akuntansi akan berjalan efektif apabila individu dalam organisasi mampu menerapkan perilaku yang sesuai dengan aturan dan etika organisasi. Dengan demikian, implementasi SIPD memerlukan kesiapan perilaku aparatur agar sistem dapat digunakan secara optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Selain faktor perilaku, aspek etika juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem informasi pemerintahan. Dalam perspektif Islam, etika dipandang sebagai landasan moral dalam menjalankan aktivitas organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan publik. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi prinsip penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Iswanaji (2021) menjelaskan bahwa etika Islam dalam akuntansi menekankan pentingnya keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban dalam penyajian informasi keuangan. Penerapan nilai tersebut dalam implementasi SIPD dapat mendorong aparatur pemerintah untuk menggunakan sistem secara jujur, disiplin, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian Amalia dan Srimaya (2023) juga menunjukkan bahwa etika Islam berperan dalam membentuk perilaku etis individu dalam praktik akuntansi. Dalam implementasi SIPD, nilai etika dapat menjadi pengendali perilaku aparatur agar tidak melakukan penyalahgunaan sistem maupun manipulasi data keuangan daerah. Selain itu, Halimatusadiah et al. (2021) menjelaskan bahwa etika pengguna sistem memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Aparatur yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih mampu memanfaatkan sistem informasi secara optimal dibandingkan aparatur yang kurang memiliki kesadaran etis dalam penggunaan teknologi informasi.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian mengenai implementasi SIPD lebih banyak menggunakan pendekatan penerimaan teknologi dan belum mengkaji secara mendalam dari perspektif akuntansi keperilakuan. Di sisi lain, penelitian mengenai etika Islam dalam akuntansi umumnya masih berfokus pada lembaga keuangan syariah dan pendidikan akuntansi, sehingga penerapannya pada sistem informasi pemerintahan daerah masih sangat terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap), yaitu belum adanya penelitian yang mengintegrasikan akuntansi keperilakuan dan etika Islam secara simultan dalam menjelaskan efektivitas implementasi SIPD pada pemerintah daerah.

Penelitian tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek penerimaan teknologi, seperti kemudahan penggunaan, manfaat sistem, dan kualitas layanan sistem informasi. Penelitian yang dilakukan

oleh Triyanti dan Widhiyani (2025) menunjukkan bahwa *perceived usefulness* dan *trust* berpengaruh terhadap penerimaan SIPD di lingkungan pemerintah daerah. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada sisi teknologi informasi dan belum membahas secara mendalam bagaimana perilaku aparatur memengaruhi efektivitas penggunaan SIPD.

Menurut Edgina (2023), etika Islam memiliki peran penting dalam profesi akuntan karena dapat membentuk sikap profesional yang didasarkan pada nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan. Dalam pandangan Islam, kegiatan akuntansi tidak hanya sebatas mencatat dan menyusun laporan keuangan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Oleh sebab itu, seorang akuntan dituntut untuk menyajikan informasi keuangan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penerapan nilai-nilai etika Islam tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), nilai etika Islam juga penting diterapkan oleh aparatur pemerintah agar pengelolaan data keuangan daerah dilakukan secara disiplin, bertanggung jawab, dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya penerapan etika Islam, penggunaan SIPD diharapkan mampu mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, penelitian mengenai etika Islam dalam bidang akuntansi umumnya lebih banyak diterapkan pada lembaga keuangan syariah maupun pendidikan akuntansi. Penelitian Amalia dan Srimaya (2023) misalnya, membahas penerapan nilai etika Islam dalam praktik akuntansi, tetapi belum mengaitkannya dengan implementasi sistem informasi pada instansi pemerintahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami perilaku aparatur pengelola keuangan serta penerapan etika Islam dalam efektivitas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan perilaku informan selama penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut John W. Creswell dan Cheryl N. Poth (2021), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu fenomena sosial yang dialami individu atau kelompok.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus karena penelitian dilakukan secara terfokus pada instansi pemerintah daerah yang menerapkan SIPD. Studi kasus dipilih agar peneliti dapat memahami kondisi nyata terkait perilaku pengguna sistem, hambatan implementasi, serta penerapan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Robert K. Yin (2021), studi kasus merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola laporan keuangan, operator SIPD, bendahara, dan pegawai yang terlibat langsung dalam implementasi SIPD. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih lengkap dan mendukung hasil penelitian. Menurut Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2020), kombinasi berbagai teknik pengumpulan data dapat meningkatkan kedalaman informasi dalam penelitian kualitatif.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*,

yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pengoperasian SIPD dan memahami proses pengelolaan keuangan daerah. Teknik ini digunakan agar peneliti memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara maupun observasi. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga mudah dipahami, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak hanya ditentukan oleh sistem teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh faktor perilaku aparatur serta nilai etika yang diterapkan dalam organisasi. Dari perspektif akuntansi keperilakuan, implementasi SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dalam menerima perubahan sistem kerja berbasis digital. Sikap positif pegawai terhadap penggunaan teknologi, kemampuan adaptasi, serta dukungan organisasi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penggunaan SIPD. Pegawai yang memiliki pemahaman terhadap manfaat sistem cenderung lebih mudah menerima dan menggunakan SIPD dalam aktivitas pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku aparatur serta penerapan nilai etika dalam organisasi pemerintahan. Penerapan SIPD membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan pola kerja dari sistem manual menuju sistem digital. Dalam perspektif akuntansi keperilakuan, perilaku individu memiliki peran penting terhadap keberhasilan penggunaan sistem informasi karena penerimaan teknologi dipengaruhi oleh sikap, persepsi, motivasi, dan kemampuan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur yang memiliki sikap positif terhadap teknologi cenderung lebih mudah menerima dan menggunakan SIPD dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dukungan organisasi seperti pelatihan, pendampingan teknis, dan lingkungan kerja yang mendukung turut memengaruhi efektivitas implementasi SIPD. Pegawai yang memahami manfaat sistem akan menganggap SIPD mampu membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mempermudah proses pelaporan keuangan daerah.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Triyanti dan Widhiyani (2025) yang menjelaskan bahwa *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan *trust* berpengaruh terhadap penerimaan SIPD di pemerintah daerah. Sistem yang dianggap mudah dipahami dan memberikan manfaat dalam pekerjaan akan lebih mudah diterima oleh pengguna dibandingkan sistem yang dianggap rumit. Penelitian Davis (1989) melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) juga menjelaskan bahwa persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan menjadi faktor utama dalam penerimaan teknologi informasi.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Setiawan (2021) menjelaskan bahwa dukungan organisasi dan lingkungan sosial dapat memengaruhi niat individu dalam menggunakan sistem informasi secara optimal. Dalam konteks implementasi SIPD, aparatur yang memperoleh dukungan organisasi dan memahami manfaat sistem cenderung lebih mampu menyesuaikan

diri dengan perubahan sistem kerja berbasis digital.

Selain faktor perilaku, penelitian ini juga menunjukkan bahwa etika Islam memiliki pengaruh terhadap efektivitas implementasi SIPD. Etika Islam menekankan nilai amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam proses penginputan data, penyusunan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah secara transparan dan akuntabel. Aparatur yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih disiplin dalam menggunakan SIPD serta menghindari tindakan manipulasi data maupun penyalahgunaan informasi keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iswanaji (2021) yang menjelaskan bahwa etika Islam dalam akuntansi menekankan prinsip kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam penyajian informasi keuangan. Prinsip tersebut relevan dalam implementasi SIPD karena sistem informasi pemerintahan dituntut mampu menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian Amalia dan Srimaya (2023) menunjukkan bahwa etika Islam berperan dalam membentuk perilaku etis individu dalam praktik akuntansi sehingga mampu meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Efektivitas implementasi SIPD juga dipengaruhi oleh integritas pengguna sistem. Aparatur yang memiliki kesadaran etis dan rasa tanggung jawab yang tinggi akan lebih optimal dalam memanfaatkan sistem informasi dibandingkan aparatur yang kurang memahami etika penggunaan teknologi informasi. Penelitian Halimatusadiah et al. (2021) menjelaskan bahwa etika pengguna sistem memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Semakin tinggi integritas dan kesadaran etis pengguna sistem, maka semakin efektif pula penggunaan sistem informasi dalam mendukung aktivitas organisasi.

Meskipun demikian, implementasi SIPD masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan kemampuan teknologi aparatur, kurangnya pelatihan penggunaan sistem, serta perubahan fitur SIPD yang cukup cepat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian aparatur mengalami kesulitan dalam proses adaptasi penggunaan sistem. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih maksimal.

Dengan demikian, implementasi SIPD tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi yang baik, tetapi juga memerlukan kesiapan perilaku aparatur dan penerapan nilai etika Islam dalam organisasi pemerintahan. Semakin baik perilaku pengguna serta semakin kuat penerapan nilai etika Islam, maka efektivitas implementasi SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien akan semakin meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis akuntansi keperilakuan dan etika Islam terhadap efektivitas implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan SIPD tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor manusia serta nilai-nilai etika yang berlaku dalam organisasi pemerintah daerah.

Dari sudut pandang akuntansi keperilakuan, efektivitas SIPD dipengaruhi oleh kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan sistem kerja berbasis digital. Hal ini terlihat dari sikap positif terhadap teknologi, kemampuan beradaptasi, persepsi mengenai kemudahan penggunaan sistem, serta dukungan lingkungan kerja. Aparatur yang memahami manfaat SIPD umumnya lebih cepat menerima dan memanfaatkan sistem tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga peran perilaku pengguna menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem.

Sementara itu, dari perspektif etika Islam, efektivitas SIPD ditopang oleh penerapan nilai-

nilai moral seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nilai tersebut mendorong aparaturnya untuk menjalankan tugas secara transparan, dapat dipercaya, serta menghindari tindakan penyimpangan atau manipulasi data keuangan. Selain itu, tingkat integritas pengguna juga menjadi aspek penting dalam memastikan sistem digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SIPD merupakan hasil keterkaitan antara perilaku aparaturnya dan penerapan nilai etika Islam dalam organisasi. Semakin baik perilaku pengguna serta semakin kuat nilai etika yang diterapkan, maka semakin optimal pula efektivitas SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E., & Srimaya, L. S. (2023). Mengintegrasikan etika Islam dalam dilema etis dan Pendidikan akuntansi. *Jurnal akademi akuntansi*, 5(4). <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i4.22345>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Edgina, I. M. (2023). Pentingnya etika Islam pada profesi akuntan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(1), 1114–1123. <https://doi.org/10.35137/jabk.v10i1.263>
- Halimatusadiah, E., Iss, A., Hariani, H., Ibadina, A., & Nurhayati, N. (2021). The influence of system user ethics in increasing the effectiveness of accounting information systems. *Research Journal of Finance and Accounting*, 12(20). <https://doi.org/10.7176/RJFA/12-20-03>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ningtyas, H. I. R. (2021). Multiparadigma dalam etika dan akhlak berperilaku di bidang ilmu akuntansi. *Jurnal Transparan STIE Yadika Bangil*, 13(1), 34–40. <https://doi.org/10.53567/jtsyb.v13i1.5>
- Prihatiningrum, D., & Hariyanto, W. (2021). Analysis of accounting information systems in Islamic perspective. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.21070/ijis.v3i0.1579>
- Setiawan, A. (2021). Islamic social environment perspective and intention decisions of accounting students at Islamic financial institutions. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Triyanti, N. K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2025). Perceived usefulness, perceived ease of use, trust, and SIPD implementation in local government. *Digital Innovation: International Journal of Management*.
- Yin, R. K. (2021). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.